

Penanganan Permukiman Kumuh Pulau Kambing Sungai Lakam Barat Kabupaten Karimun

Tesiherdawati¹, Asa Bintang Kapiarsa², Dina Fara Waidah³, Tri Mardalena⁴,
Teguh Fringgodigdo⁵

Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Karimun, Indonesia ^{1,2,3,4,5}

*Email Korespondensi: tesyherdawati9@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 02-07-2025
Disetujui 11-07-2025
Diterbitkan 13-07-2025

ABSTRACT

This study aims to analyze the characteristics and conditions of slum settlements in the Pulau Kambing area, Sungai Lakam Barat, Karimun Regency. Slum settlements are a major issue, particularly in urban areas, and are caused by various factors, including both physical and non-physical environmental conditions. These factors are important considerations in the implementation of slum management efforts. However, based on current conditions, many slum settlements remain unresolved, especially in terms of environmental, socio-economic, and cultural aspects. This research employs a qualitative method. The findings indicate that slum settlements in Pulau Kambing, Sungai Lakam Barat, Karimun Regency are predominantly characterized by substandard physical conditions, such as limited access to clean water and poor sanitation. Moreover, the public health level in the area tends to be low. Collaborative efforts between the government, communities, and relevant stakeholders are required to improve the condition of slum settlements in this region.

Keywords: Handling, Area, Slums

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik dan kondisi permukiman kumuh di wilayah Pulau Kambing, Sungai Lakam Barat, Kabupaten Karimun. Permukiman kumuh menjadi permasalahan terutama di perkotaan, permasalahan tersebut disebabkan oleh banyak faktor, baik kondisi lingkungan fisik maupun kondisi non fisik. Hal ini menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan penanganannya, meskipun melihat kondisi yang ada, masih banyak permukiman kumuh yang belum terselesaikan baik dari kondisi fisik lingkungan, kondisi sosial ekonomi dan budaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permukiman kumuh di Pulau Kambing, Sungai Lakam Barat, Kabupaten Karimun, didominasi oleh kondisi fisik yang layak huni, seperti ketersediaan air bersih yang terbatas, sanitasi yang buruk. Selain itu, tingkat kesehatan masyarakat cenderung rendah diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait untuk meningkatkan kondisi permukiman kumuh di wilayah ini.

Kata Kunci: Penanganan, Kawasan, Permukiman Kumuh

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Tesiherdawati, Asa Bintang Kapiarsa, Dina Fara Waidah, Tri Mardalena, & Teguh Fringgodigdo. (2025). Penanganan Permukiman Kumuh Pulau Kambing Sungai Lakam Barat Kabupaten Karimun. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(4b), 2236-2239. <https://doi.org/10.63822/29nvf021>

PENDAHULUAN

Tingginya jumlah penduduk di pusat kota mengharuskan kebutuhan permukiman yang layak huni segera terpenuhi. Salah satu faktor yang menyebabkan permukiman menjadi padat/kumuh adalah arus urbanisasi yang tidak terkontrol. Hal ini membuat masyarakat mengokupansi lokasi hunian secara legal maupun ilegal, sehingga terjadi kekumuhan di perkotaan. Dampak negatif dari permukiman kumuh di perkotaan meliputi masalah kesehatan masyarakat, ketidakamanan, kriminalitas, bencana alam, dan penurunan kualitas lingkungan (Afiff, 2017).

Kumala *et al.* (2014) menyebutkan bahwa kriteria permukiman kumuh meliputi kondisi bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase, pengelolaan air limbah dan persampahan, dan proteksi kebakaran. Klasifikasi karakteristik permukiman kumuh (Astuti dan Putra, 2021) terbagi menjadi 3 aspek, yaitu kondisi fisik, sosial ekonomi, dan dampaknya. Secara kondisi fisik, permukiman kumuh ditandai oleh bangunan yang rapat dan tidak teratur, kualitas konstruksi yang rendah, dan buruknya sistem sanitasi. Secara sosial-ekonomi, masyarakat umumnya memiliki tingkat pendidikan dan pendapatan rendah, serta budaya kemiskinan. Secara dampak, akibat dari kondisi tersebut, menciptakan beberapa resiko dari kesehatan, pencemaran lingkungan, dan munculnya kriminalitas.

Permukiman kumuh termasuk masalah serius di banyak kota, salah satunya adalah Pulau Kambing, Sungai Lakam Barat, Tanjung Balai Karimun. Hal tersebut ditandai dengan kondisi lingkungan buruk, kurangnya fasilitas seperti air bersih dan rumah layak, serta kurangnya perhatian dari pemerintah. Sementara itu, upaya penanganan yang ada belum efektif untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Oleh karena itu, untuk mewujudkan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan, perlu dilakukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak termasuk, pemerintah, swasta, dan masyarakat. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji kondisi tersebut dan merumuskan strategi penanganan yang tepat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengkaji penanganan permukiman kumuh di Pulau Kambing, Sungai Lakam Barat, Kabupaten Karimun. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi melalui teknik purposive sampling (Sugiyono, 2019). Penelitian dilaksanakan dari Bulan Desember 2023 – Juni 2024. Subjek penelitian adalah masyarakat setempat dan pemerintah, sementara objek penelitian adalah kondisi fisik permukiman, sosial ekonomi penduduk, infrastruktur, kebijakan pemerintah, partisipasi masyarakat, dan evaluasi program. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan melakukan pengumpulan data yang selanjutnya akan diidentifikasi untuk memahami pola permasalahan yang ada.

PEMBAHASAN

Definisi dan karakteristik kumuh di Permukiman Kumuh di Pulau Kambing

Permukiman kumuh di Pulau Kambing, khususnya di Sungai Lakam Barat, Kabupaten Karimun, adalah kawasan yang memiliki kondisi perumahan dan lingkungan yang tidak memadai. Karakteristik utama permukiman kumuh di wilayah ini mencakup tingginya kepadatan penduduk, kondisi rumah yang buruk, minim layanan dasar, dan infrastruktur tidak memadai.

Beberapa faktor yang menyebabkan pemukiman kumuh, pertama, kemiskinan yang menciptakan keterbatasan ekonomi membuat penduduk tidak mampu membangun atau memperbaiki rumah menjadi lebih layak. Kedua, urbanisasi dan migrasi yang menyebabkan peningkatan jumlah penduduk. Ketiga, kebijakan dan perencanaan kota yang kurang, hal ini menyebabkan munculnya kawasan yang kumuh. Sejalan dengan penelitian Padyansari *et al.*, (2023), yang menyebutkan bahwa faktor terjadinya pemukiman kumuh berasal dari kurangnya lapangan pekerjaan dan tingginya angka kurang mampu masyarakat dalam suatu bidang. Selanjutnya, urbanisasi yang tinggi menyebabkan peningkatan jumlah penduduk di kawasan tersebut. Kurangnya perhatian pemerintah dalam menyediakan fasilitas yang layak termasuk memperburuk kondisi, sehingga permukiman menjadi tidak terawat dan tidak memenuhi standar kenyamanan hidup yang seharusnya dinikmati oleh setiap orang.

Sebagian besar pendatang yang datang untuk berdagang di pasar berasal dari kalangan menengah ke bawah dan memilih menetap di kawasan yang dekat dengan pusat perdagangan, seperti Sungai Lakam Barat. Konsentrasi kegiatan ekonomi ini menimbulkan tekanan terhadap tata ruang yang telah direncanakan (Pasya, 2012). Perkembangan jumlah hunian tidak sebanding dengan ketersediaan lahan, sehingga masyarakat membangun tanpa memperhatikan standar teknis bangunan, bahkan memanfaatkan sebagian jalan untuk mendirikan bangunan, yang pada akhirnya menurunkan kualitas lingkungan fisik kawasan.

Dampak Permukiman Kumuh di Sungai Lakam Barat

Permukiman kumuh di Sungai Lakam Barat memiliki dampak negatif yang signifikan, baik untuk penduduk setempat maupun lingkungan. Pertama, kesehatan, dimana kesehatan yang buruk akan menyebarkan penyakit menular seperti diare, infeksi saluran pernapasan, dan penyakit kulit. Kedua, kondisi sosial yang buruk dapat meningkatkan resiko kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, dan penyakit kulit. Ketiga, ekonomi yang terbatas memperburuk kondisi kemiskinan penduduk. Keempat, lingkungan, dimana pencemaran air dan tanah mengakibatkan degradasi lingkungan.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya, masyarakat cenderung meningkatkan taraf hidupnya, termasuk memperbaiki tempat tinggal. Pertumbuhan ini memengaruhi perubahan fisik lingkungan dan menuntut ketersediaan infrastruktur yang lebih baik (Romeo *et al.*, 2002). Selain itu, kondisi kemiskinan membuat banyak penduduk tidak mampu memperbaiki atau merawat rumah mereka, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap kebersihan dan kualitas lingkungan permukiman.

Strategi Penanganan Permukiman kumuh di Sungai Lakam Barat

Untuk mengatasi masalah permukiman kumuh di kawasan Sungai Lakam Barat, beberapa strategi dapat diterapkan yang meliputi peningkatan infrastruktur, pengembangan perumahan, program pemberdayaan ekonomi, kebijakan dan regulasi yang mendukung, dan partisipasi komunitas.

Perumahan kampung tergolong sebagai perumahan marjinal karena tidak memenuhi standar hunian yang layak. Namun, penghuninya tetap berusaha menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggalnya (Laily *et al.*, 2022). Adaptasi ini dilakukan melalui perbaikan rumah atau penyesuaian perilaku, yang dikenal sebagai bentuk penyesuaian perumahan.

SIMPULAN

Permukiman kumuh di Sungai Lakam Barat, Pulau Kambing, Kabupaten Karimun, bisa terjadi melalui faktor ekonomi, sosial, dan kelemahan dalam perencanaan tata ruang. Kondisi ini menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan, sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan strategi penanganan yang menyeluruh. Upaya yang dapat dilakukan antara lain adalah peningkatan infrastruktur dasar, pengembangan perumahan terjangkau, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penerapan kebijakan tata ruang yang inklusif, serta pelibatan aktif warga dalam proses perencanaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiff, S. (2017). *Analisis Potensi dan Kerentanan Sosial Ekonomi Wilayah Pesisir Terhadap Bencana Tsunami di Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun*.
- Astuti, P. I., & Putra, R. T. (2021). Implementasi program pemberdayaan masyarakat kumuh (PMK) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Karangsong Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(2), 123–130.
- Gurniwan Kamil Pasya. (2012). Pemukiman Penduduk Perkotaan. *Jurusan Pendidikan Geografi FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia*, 12, 61–70.
- Kumala, S., Yusman, F., Kunci, K., Karakteristik, :, Kumuh, K., & Penanganan, M. (2014). Kajian Karakteristik Dan Metode Penanganan Kawasan Kumuh (Studi Kasus: Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang). *Jurnal Teknik PWK*, 3(2), 2014. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/pwk>
- Laily, S. T., Husnan, L. H., & Hidayati, S. A. (2022). Pengaruh Struktur Aset dan Profitabilitas terhadap Struktur Modal pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2020. *Target : Jurnal Manajemen Bisnis*, 4(1), 105–116. <https://doi.org/10.30812/target.v4i1.2045>
- Padyansari, R., Rahayu, M. J., & Suminar, L. (2023). Karakteristik dan Faktor Prioritas Penyebab Kekumuhan di Kawasan Permukiman Girlibanji (Pinggir Kali Banjaran-Kranji), Kabupaten Banyumas. *Desa-Kota*, 5(2), 100. <https://doi.org/10.20961/desa-kota.v5i2.72271.100-111>
- Romeo, L., Prigioni, P., Marcheselli, S., Marchiori, L., Cerpelloni, M., Fiorini, C., & Brugnone, F. (2002). Intossicazione acuta da anidride carbonica: Descrizione di due casi mortali. *Medicina Del Lavoro*, 93(1), 26–33.
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.